



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

LAPORAN 2024

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

"Biro Organisasi Setda
Provinsi Bali"



**Jl. Basuki Rahmat, Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, Bali**

 (0361)224671

 www.biroorg.baliprov.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KATA PENGHANTAR

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali ini mencerminkan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis pada tahun anggaran 2024. Dokumen ini merupakan rangkuman akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kelola Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berperan sebagai alat evaluasi, kontrol, dan pendorong peningkatan kinerja di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Evaluasi kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali didasarkan pada penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk tahun 2024.

Dari hasil analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2024, diharapkan dapat terjadi peningkatan peran kelembagaan serta efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah Provinsi



Bali secara keseluruhan dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ini mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun tersebut. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024 telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis beserta indikator kinerja, serta target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap target kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian strategis Biro Organisasi telah memenuhi 2 target yang nilai capaian realisasinya 100%.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, efektif, efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta	Persentase Perangkat daerah yang reformasi birokrasinya baik	Persen	87%	87%	100%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Perpustakaan dalam Menumbuhkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Persen	56%	56%	100%

Prestasi keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp.2,940,235,465,- dari total anggaran sebesar Rp.3,639,196,510,-. Berdasarkan penilaian kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024 secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.1 Struktur Organisasi	3
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	4
1.3.1 Aspek Strategis	4
1.3.2 Perumusan Utama.....	5
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistem Penulisan	9
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahunan 2024.....	18
1. Perbandingan target dan realisasi capaian 2023 s/d 2024.....	21



2. Perbandingan target dan realisasi capaian 2024 s/d 2029.....	22
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	33
A. Tinjauan Umum	33
B. Tujuan Khusus	33
C. Saran.....	34



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	14
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan 2024 Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi RB / indeks RB	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024	21
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	22
Tabel 3.5 Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target pada Renstra 2020-2024.....	24
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	25
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	26
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program	27
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program.....	32





BAB I

PENDAHULUAN



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah dijalankan dengan prinsip Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri sejumlah urusan pemerintahan, yang bertujuan mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Proses reformasi birokrasi serta tatalaksana dan pelayanan publik, membutuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, menuju tata pemerintahan yang menyeluruh serta berkualitas, baik fisik maupun mental. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan mempertanggungjawabkan secara berkala.

Kinerja utama Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mencakup perumusan kebijakan umum dan koordinasi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Kerjasama Daerah. Khususnya, terfokus pada strategi pemecahan persoalan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan tata kehidupan masyarakat Bali.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2024 bertujuan untuk:



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali;
2. Mendorong Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan melalui kebijakan-kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja; dan
4. Memberikan kepercayaan publik terhadap Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali didirikan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali berperan sebagai pendukung tugas Kepala Daerah dalam mengoordinasikan pembuatan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisi jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan perpustakaan.



Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

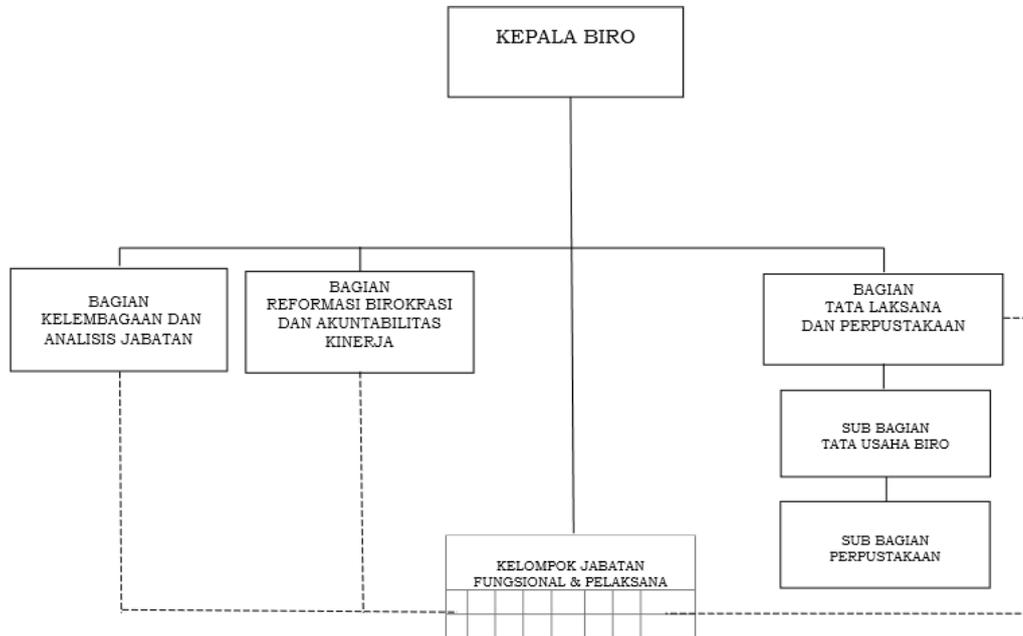
Mengenai uraian tugas Biro Organisasi Setda Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari Kepala Biro,



Kepala Bagian Kerjasama serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dengan rincian susunan sebagai berikut:



Keterangan:

_____ adalah garis perintah.

----- adalah garis koordinasi.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Pengembangan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta peningkatan Pelayanan Publik Terpadu yang cepat, pasti, dan mudah menjadi salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan ini terbagi atas pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa:

1. Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; serta
2. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menjalankan urusan tersebut, diperlukan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amanat ini menjadi dasar bagi Biro Organisasi dalam memainkan perannya terhadap aspek strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.

1.3.2 Perumusan Utama

Aspek strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
2. Belum optimalnya kinerja pustakawan secara professional
3. Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan
4. Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan Elektronik
5. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan
6. Belum optimalnya penerapan SOP dan proses bisnis dalam tata kelola Pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Bali;



7. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di pemerintah Provinsi Bali yang belum sesuai dengan harapan masyarakat;
8. Terdapat perangkat daerah yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran;
9. Sering berubahnya regulasi pengaturan tentang kebijakan Anjab/ABK, EvJab dan SKJ untuk mendukung pembinaan SDM Aparatur;
10. Belum optimalnya pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Bali;

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan LKjIP Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109); dan



16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.5 Sistem Penulisan

Berikut adalah susunan penulisan LKjIP Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan umum yang dihadapi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat simpulan umum atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Renstra Setda Provinsi Bali 2024-2026.
2. IKU Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
3. RKT Tahun 2024.
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Adapun misi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya (core bussiness) adalah membantu Gubernur mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yaitu, membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisi jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan perpustakaan.



Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan: “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD)” dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) serta survey eksternal pelayanan publik. Tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

2.1 Rencana Strategis

Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah merumuskan Rencana Strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta metode pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan memperhitungkan perkembangan masa depan. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 berisi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan pokok yang disusun bersama oleh pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali yang diemban oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mengisyaratkan hal utama yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan mudah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil dari penjabaran strategis yang menunjukkan kinerja sebagai landasan untuk menyusun program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan dan menghadapi isu-isu krusial yang dihadapi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, dirumuskanlah tujuan yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020–2024, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan (RPD).



Untuk menguraikan berbagai aspek yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali menetapkan sasaran strategis, yaitu terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD)	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	79%	81%	83%	85%	87%
			Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	-	-	39%	53%	56%



2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah gambaran tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan sebagai komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur dan jelas. Dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan strategis tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan 2024
Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

No.	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD)	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	Persen	87%
			Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	56%



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bagian dari usaha untuk merealisasikan kinerja yang tercantum dalam Renstra 2024-2026, target-target kinerja tahunan yang terkandung dalam Renstra diimplementasikan melalui perjanjian kinerja setiap tahun. Target kinerja tahunan yang diinginkan untuk tahun 2024 sesuai dengan sasaran strategis yang mengikuti Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kinerja Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.		Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	87%
		Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	56%
Program		Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.525,774,880	APBD
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp.101,698,480	APBD
3.	Program Penataan Organisasi	Rp.962,815,700.00	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.2,048,907,450.00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp.3,639,196,510	APBD



Tercapainya sasaran “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.” dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik serta indikator Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam upaya untuk mencapai kedua sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran Rp.525,774,880,-.
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan anggaran Rp.101,698,480,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.962,815,700,-
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.2,048,907,450,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai langkah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang kemudian diuraikan dalam kebijakan, program, dan kegiatan, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Pertanggungjawaban tersebut melibatkan beberapa indikator kinerja dan proses pengukuran atau penilaian kinerja secara menyeluruh. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai pencapaian kinerja dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk mengkategorikan kinerja (menentukan posisi) sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian	Realisasi Kinerja Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

A. Capaian Kinerja Tahunan 2024

Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat dievaluasi melalui pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi



Birokrasinya Baik dan juga indikator Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik

Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia dijalankan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi: RB General dan RB Tematik. RB General, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, merupakan upaya untuk menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

1 Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara holistik. 1 RB General mencakup delapan area perubahan utama: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen 2 SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas 3 pelayanan publik.

Tabel 3.2

Hasil Evaluasi RB/ indeks RB

RB General Awal	80.31
Koefisien	0.8
RB General	81.11
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	81.11
RB Tematik	12.35
Index RB	93.46

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Indeks RB Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 93,46. Pencapaian ini merupakan hasil dari penilaian RB General dan RB Tematik. Nilai RB General Provinsi Bali adalah 81,11, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,94. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, meliputi area-area seperti manajemen perubahan, penataan regulasi, penguatan organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, RB Tematik Provinsi Bali memperoleh nilai 12,35. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, RB Tematik



tetap berperan penting dalam mencapai target Indeks RB yang telah ditetapkan. RB Tematik berfokus pada isu-isu prioritas yang membutuhkan penanganan khusus dan terukur, seperti reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi RB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang merupakan revisi dari Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020.

2. Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

Indikator "Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)" merupakan salah satu ukuran keberhasilan Biro Organisasi dalam meningkatkan kualitas perpustakaan di Provinsi Bali. Pada tahun 2024, persentase perpustakaan yang sesuai dengan SNP mencapai 56%, menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah perpustakaan di Bali telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Organisasi, seperti pengelolaan perpustakaan, pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan sekolah, dan pengembangan layanan perpustakaan elektronik.

Salah satu fokus utama dalam pembinaan perpustakaan adalah pembinaan perpustakaan sekolah. Data menunjukkan bahwa dari 338 perpustakaan sekolah di Provinsi Bali, 203 di antaranya telah dibina dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Pembinaan perpustakaan sekolah meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan koleksi buku yang berkualitas, pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, dan penerapan sistem pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024, masih terdapat 135 perpustakaan sekolah yang belum memenuhi SNP. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan perlu terus ditingkatkan agar seluruh perpustakaan di Bali dapat memenuhi standar nasional. Pemerintah Provinsi Bali, melalui Biro Organisasi, berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan pelaksanaannya.



Upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan mendorong minat baca masyarakat Bali. Dengan tersedianya perpustakaan yang memenuhi standar nasional, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi dan pengetahuan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali.

B. Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja

Semua sasaran strategis yang termuat dalam PK Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja pada tahun ke-1, yang juga merupakan tahun pertama dari periode Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Evaluasi tingkat pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi capaian 2023 s/d 2024

Berikut adalah rincian perbandingan tingkat pencapaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran strategis antara tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
			2023			2024		
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	85%	87,5%	103%	87%	87%	100%



memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	53%	58%	109%	56%	56%	100%
---	---	-----	-----	------	-----	-----	------

Berdasarkan informasi dalam tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa sejumlah sasaran strategis telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya, pencapaian sasaran strategis pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan tingkat kestabilan yang cukup baik. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan serta jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya capaian sasaran strategis pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2024 relatif stabil.

2. Perbandingan target dan realisasi capaian 2020 s/d 2024

Berikut adalah rincian perbandingan tingkat pencapaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih,	Persentase Perangkat Daerah Yang	79%	81%	83%	85%	87%	79%	81%	84%	87,5%	87%



akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Reformasi Birokrasinya Baik											
	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	-	-	39%	53%	56%	-	-	39%	58%	56%	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian beberapa sasaran strategis pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perincian perbandingan antara tingkat pencapaian kinerja hingga tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Target pada Renstra 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan	Ket.
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel	Persentase Perangkat Daerah Yang	87%	91%	95%	-



dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Reformasi Birokrasinya Baik				
	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	56%	60%	93%	-

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rancangan Strategis tahun 2024-2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, hal ini tidak meniadakan kemungkinan adanya kendala atau hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut. Berikut ini adalah analisis kinerja dan opsi solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	87%	87%	100%	Tercapai	Upaya Peningkatan Kinerja di Tahun Berikutnya



dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	56%	56%	100%	Tercapai	
--	---	-----	-----	------	----------	--

Secara keseluruhan, realisasi sasaran strategis di Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah mencapai target yang ditetapkan tanpa menghadapi kendala yang signifikan. Beberapa opsi solusi telah dijelaskan dalam tabel sebelumnya sebagai langkah untuk mengatasi potensi hambatan dalam mencapai sasaran strategis.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali menggunakan sumber daya sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	87%	87%	100	3,011,723,150	2,354,041,055	78.16	127



2	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	56%	56%	100	627,473,360	586,194,410	93.42	107
---	---	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------	-----

Dari data yang tersaji dalam tabel di atas, terbukti bahwa pelaksanaan sasaran strategis di Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat efisiensi yang tinggi diatas 100% dengan rata-rata pencapaian kinerja mencapai 100%, sementara pencapaian target keuangan rata-rata mencapai diatas 50%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui pengaruh program, kegiatan maupun sub kegiatan terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang/ tidak menunjang
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	87%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	100%	Menunjang



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang/ tidak menunjang
	prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	Menunjang	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	100%	Menunjang	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				Persentase Perangkat Daerah yang Reformasinya Baik	100%	Menunjang	



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang/ tidak menunjang
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	Menunjang
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	100%	Menunjang
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	100%	Menunjang
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	100%	Menunjang
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	Menunjang
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100%	Menunjang
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100%	Menunjang
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional	56%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik	100%	Menunjang



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang/ tidak menunjang
	efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Perpustakaan (SNP)		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	100%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100%	Menunjang
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	100%	Menunjang
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100%	Menunjang
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 ITSM : Information Technology Service	100%	Menunjang
				Pembudayaan Gemar Membaca	Persentase Kegemaran	100%	Menunjang



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang/ tidak menunjang
				Tingkat Daerah Provinsi	Membaca Masyarakat		
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	100%	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	100%	Menunjang
				Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	100%	Menunjang
				Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	100%	Menunjang
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	Menunjang
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	100%	Menunjang

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan didukung oleh 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Adapun jumlah dana yang dianggarkan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali tahun 2024 secara keseluruhan berjumlah Rp.3,639,196,510.00,-. Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024 pada tabel 3.8 sebagai berikut:



Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
I	Program Pembinaan Perpustakaan	525,774,880.00	486,215,430.00	92.48
A	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	337,728,460.00	314,114,950.00	93.01
1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	67,682,140.00	65,261,340.00	96.42
2	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	137,682,140.00	136,213,510.00	98.93
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	64,682,040.00	53,905,560.00	83.34
4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	67,682,140.00	58,734,540.00	86.78
B	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	188,046,420.00	172,100,480.00	91.52
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	62,682,140.00	51,729,920.00	82.53
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	125,364,280.00	120,370,560.00	96.02
II	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	101,698,480.00	99,978,980.00	98.31
A	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50,330,940.00	49,095,540.00	97.55
1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50,330,940.00	49,095,540.00	97.55
B	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	51,367,540.00	50,883,440.00	99.06
1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	51,367,540.00	50,883,440.00	99.06
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2,048,907,450.00	1,543,502,036.00	75.33
A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,355,700.00	2,859,100.00	65.64
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4,355,700.00	2,859,100.00	65.64
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,184,908,410.00	839,461,696.00	70.85



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	17,059,760.00	15,541,200.00	91.10
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873,690,650.00	685,189,157.00	78.42
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294,158,000.00	138,731,339.00	47.16
C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859,643,340.00	701,181,240.00	81.57
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	769,583,340.00	666,021,240.00	86.54
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,060,000.00	35,160,000.00	39.04
IV	Program Penataan Organisasi	962,815,700.00	810,539,019.00	84.18
A	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	387,682,140.00	359,376,891.00	92.70
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	80,000,000.00	72,633,487.00	90.79
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota	120,000,000.00	109,898,744.00	91.58
3	Penataan Analisis Jabatan	187,682,140.00	176,844,660.00	94.23
B	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	575,133,560.00	451,162,128.00	78.44
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	120,630,840.00	99,915,601.00	82.83
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	167,514,440.00	144,535,556.00	86.28
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	19,885,100.00	12,609,531.00	63.41
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	109,859,640.00	87,397,120.00	79.55
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	157,243,540.00	106,704,320.00	67.86

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024 telah 100% mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata realisasi keuangan mencapai 80.79%.



C. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran setelah perubahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dalam APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2024 Belanja Langsung sebesar Rp 3,639,196,510,-. Selanjutnya jumlah tersebut terinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja Program Pembina Perpustakaan sebesar Rp.525,774,880 dengan realisasi sebesar Rp.486,215,430 atau sebesar 92.48%
- b. Anggaran Belanja Program Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Rp.101,698,480 dengan realisasi sebesar Rp.99,978,980 atau sebesar 98.31%
- c. Anggaran Belanja Program Penataan Organisasi sebesar Rp.2,048,907,450 dengan realisasi sebesar Rp.1,543,502,036 atau sebesar 75.33%
- d. Anggaran Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp.962,815,700 dengan realisasi sebesar Rp.810,539,019 atau sebesar 84.18%



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2024 menyajikan sejumlah pencapaian serta hambatan dalam mencapai sasaran strategisnya. Laporan ini juga mencerminkan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin dalam akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2024 Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Bali memiliki realisasi anggaran sebesar Rp.3,639,196,510,- atau 80.79% dari pagu dengan realisasi fisik mencapai 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2024 dapat dikatakan 'berhasil', karena 2 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis mencapai 100%.

Pencapaian Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berbagai langkah telah diambil untuk mencapai hasil tersebut, termasuk peningkatan kinerja di unit-unit pemerintahan setempat, penguatan budaya kerja, penegakan disiplin pegawai, serta peningkatan kualifikasi para aparatur guna memaksimalkan penggunaan sumber daya demi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

B. Tujuan Khusus

Meskipun Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan efektif, namun masih perlu dilakukan peningkatan sosialisasi terkait sistem penilaian kinerja kepada setiap unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar



setiap pegawai memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja, sehingga diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan organisasi di masa mendatang. Terlepas dari hal tersebut, masih terdapat kekurangan terutama dalam koordinasi untuk mencapai penyusunan laporan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, perlu dilakukan peningkatan koordinasi guna memastikan bahwa laporan dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Saran

Adapun hal-hal yang disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi oleh pimpinan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di masa depan;
2. Dalam rangka mencapai kinerja yang unggul dari setiap unit kerja, penting untuk menerapkan disiplin pegawai, memperkuat budaya kerja yang positif, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
3. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KETUT NAYAKA
Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BALI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I DEWA PUTU SUNARTHA
Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA PROVINSI BALI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKDA PROVINSI BALI,

I DEWA PUTU SUNARTHA
NIP. 19650430 199112 1 002

Bali, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV.
BALI,



KETUT NAYAKA
NIP. 19680911 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	87%
	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	60%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 525.774.880	APBD
2 Program Pelestarian Karya Cetak Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 101.698.480	APBD
2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 2.061.662.050	APBD
3 Program Penataan Organisasi	Rp. 963.091.000	APBD
Total Anggaran	Rp. 3.652.226.410	APBD

Pihak Kedua,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKDA PROVINSI BALI

I DEWA PUTU SUNARTHA
NIP. 19650430 199112 1 002

Bali, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA
PROV. BALI,



KETUT NAYAKA
NIP. 19680911 198903 1 005

Sasaran kinerja pegawai
Pendekatan Metode Kualitatif
Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Mandiri

Pemerintah Provinsi Bali

Periode Penilaian : 02/01/2024 s.d 31/12/2024

Pegawai Yang Dinilai			Pejabat Penilai Kinerja		
Nama	:	KETUT NAYAKA, SH, MH.	Nama	:	I DEWA PUTU SUNARTHA, SE.M.SI
NIP	:	196809111989031005	NIP	:	196504301991121002
Jabatan	:	KEPALA BIRO ORGANISASI	Jabatan	:	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Unit Kerja	:	BIRO ORGANISASI	Unit Kerja	:	SEKRETARIAT DAERAH

HASIL KERJA				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator	Target	Perspektif
	UTAMA			

HASIL KERJA				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator	Target	Perspektif
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	87 Persentase	Penerima Layanan
2.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	60 Persentase	Penerima Layanan
3.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase direktif Pimpinan yang diselesaikan sesuai target	100 Persentase	Proses Bisnis
TAMBAHAN				
1.	Terlaksananya rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja utama organisasi dalam perjanjian kerja	Persentase rencana aksi/inisiatif strategi sesuai sasaran dan IKU organisasi	100 Persentase	Proses Bisnis
PERILAKU KERJA				
1.	Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Melakukan perbaikan tiada henti		

HASIL KERJA

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator	Target	Perspektif
2.	Akuntabel <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya		
3.	Kompeten <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan		
4.	Harmonis <ul style="list-style-type: none">- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder		
5.	Loyal <ul style="list-style-type: none">- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan negara		

HASIL KERJA

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator	Target	Perspektif
6.	Adaptif <ul style="list-style-type: none">- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas- Bertindak proaktif	Terus berinovasi dalam rangka mempercepat indeks Reformasi Birokrasi		
7.	Kolaboratif <ul style="list-style-type: none">- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama		

Pegawai yang dinilai

KETUT NAYAKA, SH, MH.
NIP. 196809111989031005

Denpasar, 02 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

I DEWA PUTU SUNARTHA, SE.M.SI